



Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia

Anneke Zehan Puspita Sari

Universitas Padjadjaran

Naomi Glori Natalia

Universitas Padjadjaran

Ratu Wulan Nur Cahya

Universitas Padjadjaran

Rudiana

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: anneke20002@mail.unpad.ac.id naomi20006@mail.unpad.ac.id
ratu20001@mail.unpad.ac.id rudiana2017@unpad.ac.id

Abstract. *Participation of the community is a key factor in sustainable development. In order to achieve this, the Indonesian government needs to ensure that the community can actively participate in the development process. One of the efforts that can be made by the government to encourage community participation in development is by applying the principles of Good Governance. Good Governance has four main pillars, namely transparency, accountability, participation, and responsiveness. This research shows that the application of Good Governance principles can increase community participation in development in Indonesia. In addition, Good Governance strategies such as transparency and accountability, community participation in decision-making, improving the capacity of government officials, and improving the quality of public services can be applied to ensure active community participation in development. The Indonesian government needs to increase efforts to encourage community participation in development. One of the efforts that can be made is to consistently and transparently apply the principles of Good Governance. The government also needs to provide complete and easily understood information access to the community, as well as provide opportunities for the community to give input and opinions in the decision-making process. Improving the capacity of government officials is also necessary so that they have adequate competence in carrying out their duties and responsibilities. The government must also ensure that the public services provided are of quality and satisfactory to the community. By implementing these efforts, it is hoped that community participation in development can increase and create more sustainable and equitable development for all people in Indonesia.*

Keywords: *Public Participation, Good Governance, Development, Indonesia*

Abstrak. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Good Governance memiliki empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Penelitian

ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, strategi Good Governance seperti transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas pejabat pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik dapat diterapkan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan secara konsisten dan transparan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Pemerintah juga perlu menyediakan akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas pejabat pemerintah juga diperlukan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan publik yang disediakan berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat dan menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Good Governance, Pembangunan, Indonesia

LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin ditekankan oleh pemerintah sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu dipastikan dapat terlaksana secara efektif dalam proses pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan menerapkan prinsip Good Governance. Good Governance sendiri bukanlah konsep yang baru, melainkan telah diakui oleh banyak negara sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Good Governance sendiri memiliki empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.

Sumber hukum yang mengatur tentang Good Governance di Indonesia sangatlah penting dan memegang peranan yang besar dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Selain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat juga banyak dokumen internasional yang mengatur tentang Good Governance seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank. Dokumen-dokumen ini memberikan panduan dan acuan tentang bagaimana Good Governance dapat diterapkan di Indonesia dan memastikan agar pemerintah

dan institusi publik lainnya dapat beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dengan menerapkan prinsip Good Governance, pemerintah dapat memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan, akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran publik, partisipasi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, dan responsivitas pemerintah dalam menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, Good Governance menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Namun, dengan adanya dukungan dari masyarakat, Good Governance dapat terlaksana dengan baik dan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaruh penerapan prinsip Good Governance pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.

Proses penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data: Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
2. Seleksi data: Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
3. Analisis data: Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaruh penerapan prinsip Good Governance pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.
4. Interpretasi dan pembahasan hasil analisis: Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dibahas untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan relevan terkait dengan pengaruh penerapan prinsip Good Governance pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh penerapan prinsip Good Governance pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia

Menurut Amartya Sen (1999), pembangunan adalah suatu proses yang menghasilkan peningkatan kemampuan hidup manusia. Sedangkan menurut Paul Streeten, pembangunan adalah suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengarah pada peningkatan ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi. Tujuan dari pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat adalah komponen yang sangat penting. Menurut Robert Dahl (1970) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu proses di mana individu-individu dalam masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Dahl, partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek penting dari demokrasi yang sehat. Untuk itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini penting karena partisipasi masyarakat memungkinkan kepentingan dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun sudah ada upaya-upaya dari pemerintah dan institusi publik lainnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa tidak tertarik atau tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia antara lain kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan, serta masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang menjadi kendala dalam berpartisipasi.

Namun demikian, terdapat juga beberapa inisiatif dari masyarakat yang menunjukkan semangat dan keinginan untuk terlibat dalam pembangunan. Salah satu contohnya adalah gerakan sosial yang dikenal dengan sebutan "gotong royong". Gerakan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Selain itu, terdapat juga berbagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Good Governance dalam Pembangunan

Good governance merupakan sebuah konsep penting dalam pembangunan di Indonesia. Konsep ini merujuk pada tata kelola yang baik dan transparan dalam menjalankan pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik harus mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat serta dapat menghindari segala bentuk korupsi dan nepotisme.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, good governance menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah pemerintahan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Beberapa indikator good governance yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Indonesia antara lain:

- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik
- Penegakan hukum yang adil dan transparan
- Kebebasan pers dan hak asasi manusia yang dihormati
- Efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Dalam upaya meningkatkan good governance di Indonesia, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberikan masukan dan feedback terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tata kelola yang baik dijalankan secara konsisten dan transparan. Penegakan hukum yang adil dan transparan juga menjadi kunci penting dalam mencegah korupsi dan nepotisme dalam jalannya pemerintahan.

3. Strategi Good Governance sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Good Governance atau tata kelola yang baik dalam pembangunan negara. Good Governance menjadi kunci penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi faktor penting yang memperkuat konsep Good Governance tersebut.

Maka dari itu, berbagai strategi perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pemerintah dapat mencapai Good Governance secara efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan di Indonesia:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam Good Governance. Pemerintah harus memberikan akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat berupa publikasi laporan keuangan dan kegiatan pemerintah secara terbuka dan transparan. Melalui transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana penggunaan anggaran negara dilakukan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
2. **Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan** Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting dalam pembangunan sangat diperlukan. Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan partisipasi dalam lembaga legislatif. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting akan memberi ruang bagi aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk dapat terwujud dalam kebijakan pembangunan.
3. **Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah** Peningkatan kapasitas aparat pemerintah sangat penting dalam mewujudkan Good Governance. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pemerintah agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aparat pemerintah bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah, maka pemerintah akan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tolok ukur dari Good Governance. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pelayanan publik tidak dipungut biaya yang tidak seharusnya. Dengan pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat akan merasa dihargai dan merasa terlibat dalam proses pembangunan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan Good Governance dapat terwujud dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat merupakan kunci penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Good Governance menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, Good Governance masih menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Namun, dengan adanya dukungan dari masyarakat, Good Governance dapat terlaksana dengan baik dan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, strategi Good Governance seperti transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas aparat pemerintah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diterapkan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip Good Governance secara konsisten dan transparan. Pemerintah juga perlu memberikan akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah juga perlu dilakukan agar aparat pemerintah memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat dan menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Dahl, R. A. (1970). *Modern political analysis* (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*.
- Schedler, A. (1999). *Conceptualizing Accountability*. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (pp. 13-28). Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- United Nations Development Programme. (2004). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- Suharto, Edi (2012). *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman J. (2016). *Pembangunan Indonesia: Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat*. Jakarta: Kompas Gramedia.